

Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi

Subayil

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Lombok Barat, NTB

Subayil19@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

Education policy is a comprehensive measure related to the time devoted to what and who the policy is made for. So that the existence of educational policies has a positive effect on all dimensions of life that are related to education itself, starting from the input process to the output process of the educational activity itself. And in the end, education policy is not only a periodic political policy agenda. However, education policy itself does have a significant impact on the development of education in the current era of globalization.

Keywords : Education Policy, Globalization Era, and Quality of Human Resources.

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan merupakan tindakan yang bersifat komprehensif terkait dengan waktu yang ditujukan untuk apa dan siapa kebijakan tersebut dibuat. Sehingga keberadaan kebijakan pendidikan memberikan efek yang positif terhadap seluruh dimensi kehidupan yang memiliki keterkaitan terhadap pendidikan itu sendiri, mulai dari proses input hingga proses output dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Dan pada akhirnya, kebijakan pendidikan bukan hanya menjadi agenda kebijakan politik yang bersifat periodik. Akan tetapi, kebijakan pendidikan itu sendiri memang memberikan

dampak signifikan terhadap pengembangan pendidikan di era globalisasi saat ini.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, Era Globalisasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan sering kali dituding kurang kontekstual sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara empiris, evaluatif, dan normatif serta memberi pedoman yang jelas bagi pengejawantahan formulasi, implementasi dan evaluasinya. Sebagai suatu produk, kebijakan pendidikan sering tidak diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara sinergis, bukan sebagai komponen yang terdikotomi. Dalam era globalisasi saat ini maka sangat diperlukan kembali suatu formulasi pendidikan yang saling terintegrasi yang dapat mengakomodir semua kebutuhan dari kehidupan bermasyarakat. Terlebih pada masa globalisasi saat ini merupakan masa di mana orang dapat mengekspresikan semua keinginannya dan menjunjung prinsip kebebasan yang mendunia dalam segala bidang termasuk pendidikan. Pada era globalisasi ini, baik yang mencakup aspek ekonomi, budaya, politik, atau aspek sosial bahkan pendidikan sekalipun akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut bersaing di setiap negara peserta. Persaingan bebas seperti ini menuntut kesiapan setiap negara secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Kalau tidak, negara tersebut harus bersiap-siap untuk bangkrut dan keluar dari arena persaingan (Nusa Putra: 2013, 158).

Dalam kondisi yang demikian itu, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh sebuah negara yaitu melaksanakan atau mereformasi sistem

perekonomian, sistem perdagangan, sistem produksi atau sistem pembinaan sumber daya manusianya yang sesuai dengan tuntutan era pasar bebas tersebut. Jika negara tersebut tidak mengindahkan hal itu, produk barang atau jasanya tidak memiliki daya saing yang memadai. Dengan demikian, para investor dan atau para buyers tersebut tidak akan pernah berkehendak untuk tertarik dengan produk barang atau jasa negara tersebut. Dengan kata lain, orang atau negara tertentu hanya akan tertarik pada suatu barang atau jasa yang mempunyai kualitas tinggi dan dengan harga jual yang mampu bersaing. Negara-negara tertentu yang tidak memiliki hal itu akan tetap berkedudukan hanya sebagai negara pemakai atau penikmat keberhasilan negara lain. Uraian yang tertuju pada kecenderungan global yang didasari oleh tinjauan ekonomi di atas, hanya akan meletakkan kita pada suatu kondisi bahwa kita belum banyak melakukan perubahan dalam menghadapi era pasar bebas tersebut (Asep Saepul Hamdi; E. Bahrudin: 2014, 12-13).

Dengan kata lain, negara Indonesia atau pemerintah Indonesia, belum siap menghadapi era persaingan bebas atau era globalisasi tersebut, baik dalam mutu atau kualitas produk, maupun mutu sumber daya manusianya sendiri. Kualitas sumber daya manusia Indonesia, berdasarkan hasil survei lembaga internasional UNDP, termasuk dalam urutan ke-102 dari 170-an negara di dunia. Bahkan Indonesia berada jauh di bawah beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand (52), Malaysia (53), dan Filipina (95).

Era globalisasi juga merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Kita tidak akan lagi bisa menyembunyikan kebobrokan atau keadaan yang buruk dari suatu negara. Hal itu kemungkinan terjadi berkat kemajuan teknik informatika. Kejadian apapun yang dialami oleh sebuah negara, dalam waktu singkat akan diketahui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam waktu yang relatif singkat berita baik atau buruk di suatu negara telah mengglobal. Di dalam konteks informatisasi, dunia ini sudah menjadi satu, tidak ada lagi kotak-

kotak yang membatasi wilayah satu dengan lainnya. Azril Azahari dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul Dampak Globalisasi di Pendidikan Tinggi untuk Mengantisipasi Tahun 2020 menyebutnya dengan istilah dunia ialah satu tempat yang tunggal tanpa batas (*borderless world and only one earth*) (Azril Azahari: 2020, 79).

Globalisasi ini memungkinkan menjadi sebuah proses interaktif yang mengembangkan suatu kebudayaan dunia yang sama sehingga akan memunculkan suatu kebudayaan atau peradaban universal. Dengan demikian, kemajuan dan keterbelakangan suatu negara menjadi demikian transparan. Posisi dan keadaan satu negara dibandingkan dengan negara lain demikian jelas. Hal ini berimplikasi pada implementasi proses-proses global, seperti proses humanisasi dan proses demokratisasi (Tilaar H.A.R: 2001, 4-7). Di samping itu, hal ini akan mengarah pada proses kehidupan urban, serta kebudayaan yang sama di mana saja atau munculnya ide-ide teknologi yang umum. Indonesia, sebagai bagian dari proses global, harus dapat menunjukkan komitmennya dalam menghadapi tuntutan tersebut (Azril Azahari: 2020, 80).

Mencermati latar belakang tersebut, sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung penting dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi kecenderungan global tersebut. Oleh karena itu perlu juga mencoba melihat lebih jauh tentang konsep globalisasi dan kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan SDM Indonesia. Kemudian perlu pula ditinjau lebih lanjut tentang berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan peningkatan SDM tersebut.

PEMBAHASAN

Konsep dan Makna Era Globalisasi

Kata globalisasi berasal dari kata dasar global, yang artinya menyeluruh, seluruhnya, garis besar, secara utuh, dan kesejagatan. Jadi globalisasi dapat diartikan sebagai pengglobalan seluruh aspek kehidupan, perwujudan (perubahan) secara menyeluruh aspek kehidupan. Era globalisasi dalam arti terminologi adalah sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan diantara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi dibidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi juga dimaknai dengan gerakan mendunia, yaitu suatu perkembangan pembentukan sistem dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat global. Era globalisasi memberikan perubahan besar pada tatanan dunia secara menyeluruh dan perubahan itu dihadapi bersama sebagai suatu perubahan yang wajar (Abuddin Nata: 2005, 14).

Sebab mau tidak mau, siap tidak siap perubahan itu akan terjadi. Era ini di tandai dengan proses kehidupan mendunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang tranformasi dan komunikasi serta terjadinya lintas budaya. Konsep pasar persaingan sempurna (*the perfect market*) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seluruh pemain dalam suatu pasar persaingan bebas dapat keluar dan masuk pasar sesuai dengan pertimbangan rasionalnya masing-masing. Pada pasar tersebut produk yang ditawarkan dapat berupa barang atau jasa. Dalam era pasar bebas tersebut ikatan teritorial kewilayahan sebuah negara menjadi demikian longgar, terutama negara-negara yang terikat dengan perjanjian-perjanjian multilateral dengan negara-negara lain, baik dalam suatu kawasan atau antarkawasan (Majda El-Muhtaj: 2005, 34).

Konsep inilah yang kemudian sering kali dimaknai sebagai era globalisasi. Perubahan yang sangat cepat di era globalisasi tidak lain

disebabkan oleh faktor teknologis. Keberadaan teknologi seperti halnya komputer dan internet sebagai simbol teknologi di era informasi sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Kedua alat tersebut selain memberikan informasi an sich, juga memberikan informasi gaya hidup, perubahan sosial, pola pikir dan sebagainya. Akibatnya globalisasi telah membawa implikasi yang sangat luas terhadap segala aspek kehidupan manusia baik aspek ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, agama, serta aspek-aspek yang lain. Saat memasuki 1 Januari 2003, Indonesia telah memasuki era pasar bebas untuk kawasan Asia Tenggara yang lebih dikenal dengan AFTA 2003. Konsep AFTA 2003 ini mengandung pengertian bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara anggota ASEAN telah melakukan suatu kesepakatan bersama untuk melaksanakan program pasar bebas ASEAN pada tahun 2003.

Namun pada kenyataannya, sampai pada hitungan minggu kedua bulan Januari 2003, tampaknya sebagian masyarakat Indonesia atau khususnya para pelaku bisnis tidak mengerti atau mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar bebas, seperti apa format pasar bebas tersebut, atau apa kebijakan pemerintah tentang itu, belum pernah tersosialisasikan kepada para pelaku bisnis (M. Shiddiq Al-Jawi: 2006, 17). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesungguhan pemerintah menyambut AFTA 2003 ini dapat dikatakan sangat tidak memadai. Hal-hal mendasar yang berhubungan dengan konsep dan format yang akan diambil saja belum disosialisasikan kepada para pelaku bisnis atau masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tindakan konkret pemerintah sendiri sebagai sebuah institusi publik, sampai detik ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan diambil.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa di dunia. Sebagai bangsa, kita tidak hidup sendiri melainkan hidup dalam satu kesatuan

masyarakat dunia (*world society*). Kita semua merupakan makhluk yang ada di bumi. Karena itu, manusia secara alam, sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya tidak dapat saling terpisah melainkan saling ketergantungan dan mempengaruhi. Era globalisasi yang merupakan era tatanan kehidupan manusia secara global telah melibatkan seluruh umat manusia (M. Shiddiq Al-Jawi: 2006, 17).

Di Indonesia sejak bergulirnya reformasi, gelombang demokratisasi semakin marak dan tuntutan akan keterbukaan politik semakin terlihat. Dari sisi budaya, era globalisasi ini membawa beraneka ragam budaya yang sangat dimungkinkan mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, dan sistem nilai masyarakat suatu negara (Majda El-Muhtaj: 2005, 56).

Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan pandai menyiasati pengaruh budaya silang sehingga bangsa kita dapat mengambil nilai budaya yang positif yaitu mengambil nilai budaya yang bermanfaat bagi kehidupan dan pembangunan bangsa serta tidak terjebak pada pengaruh-pengaruh budaya yang negatif. Kita juga harus belajar melihat dunia dari perspektif yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing tanpa melunturkan nilai identitas budaya bangsa kita. Dengan memahami perbedaan dan persamaan kebudayaan tadi akan menumbuhkan saling pengertian dan saling menghargai antar kebudayaan yang ada.

Aspek-Aspek Positif dan Negatif Dari Globalisasi

Globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan akan membuat setiap bangsa menjadi bagian dari sistem nilai dunia. Globalisasi ekonomi memungkinkan terjadinya sinergi positif antara beberapa kelompok ekonomi dalam negeri dengan kelompok ekonomi luar negeri. Sinergi ekonomi positif yang berciri multilateral ini perlu diarahkan untuk tidak mematikan kelompok-kelompok ekonomi yang sejenis di negara-negara yang beraliansi ekonomi secara multilateral tersebut. Secara politis, era globalisasi dapat menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yaitu kesadaran

hak dan kewajibannya serta kesadaran tanggung jawab dalam bernegara. Pada masa reformasi, demokrasi telah membawa perubahan-perubahan yang besar diantaranya pelaksanaan pemilihan umum legislatif dengan sistem multipartai dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Aspek negatif globalisasi dapat dicontohkan sebagai berikut: berhadapan dengan kekuatan global negara-negara dunia ketiga akan sulit mempertahankan pola produksinya dan sulit meningkatkan taraf hidupnya (Asep Saepul Hamdi; E. Bahrudin: 2014, 78).

Pada umumnya negara-negara berkembang akan terperangkap dengan hutang-hutangnya yang semakin lama semakin menggelembung. Dari sudut pandang politik, arus globalisasi telah mengembuskan demokratisasi di banyak negara. Apa yang terjadi di kebanyakan negara berkembang akan memunculkan sikap dan tindakan anarkis yang dapat memakan banyak korban di antara sesama. Wawasan kebangsaan semakin terpuruk sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terjadinya gejala disintegrasi ini karena penguasa atau elit politik dianggap sudah tidak lagi memperhatikan nasib dan kepentingan rakyat. Sebaliknya, penguasa hanya mementingkan kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Globalisasi merupakan suatu gejala wajar yang pasti akan dialami oleh setiap bangsa di dunia, baik pada masyarakat yang maju, masyarakat berkembang, masyarakat transisi, maupun masyarakat yang masih rendah taraf hidupnya. Dalam era global, suatu masyarakat/negara tidak mungkin dapat mengisolasi diri terhadap proses globalisasi. Jika suatu masyarakat/negara mengisolasi diri dari globalisasi, mereka dapat dipastikan akan terlindas oleh jaman serta terpuruk pada era keterbelakangan dan kebodohan (M. Hasbullah: 2015, 13).

Dampak positif dan negatif pada pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pun ada. Salah satunya era globalisasi pada sistem politik. Bangsa Indonesia telah menerapkan kehidupan berdemokrasi yang telah membawa perubahan-perubahan yang besar,

diantaranya pelaksanaan pemilu legislatif dengan sistem multipartai dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Itu dampak positifnya. Sedang dampak negatifnya ialah pada kebanyakan negara berkembang akan memunculkan sikap dan tindakan anarkis yang dapat memakan banyak korban diantara sesama (M. Hasbullah: 2015, 45-46).

Sejarah dan Makna Teori Kebijakan

Kejelasan maknawiyah tentang kebijakan dapat ditelusuri dari literatur kebijakan tentang ketatanegaraan yang menganggap bahwa ilmu kebijakan sering dianggap lebih dekat kepada Administrasi Negara dibandingkan dengan Ilmu Politik. Ilmu kebijakan berkembang sejak ada usaha-usaha awal penetapan perauran-peraturan yang sah. Menurut Adian Husaini, dkk (2013: 45) dalam sejarahnya dikenal ada tiga fase perkembangan sumber teori kebijakan, yaitu: Pertama, fase sebelum abad ke-19 dikenal empat sumber teori kebijakan yaitu:

- a. Kode Hammurabi, yaitu kode yang mengatur hak dan kewajiban dengan mencantumkan persyaratan sosial-ekonomi bagi kehidupan masyarakat transisi Babilonia pada aspek: prosedur kriminal, hak milik, perdagangan, hubungan keluarga, perkawinan, dana kesehatan, pertanggungjawaban publik.
- b. Paranormal/Ahli Nujum, yaitu usaha meramal dampak untuk memperbaiki kebijakan lebih lanjut dari para Penasihat Kerajaan, seperti dalam kitab Arthashastra, Kautilya (300 SM) di Mauryan, India Utara; atau dalam Politics and Ethics, Aristoteles (384-322 SM) di Mecedonia.
- c. Pengetahuan yang dispesialisasikan, yaitu ketika masuknya pengaruh ilmu pengetahuan dari golongan akademisi, seperti pengaruh Pendeta/Rohaniawan dan/atau Sarjana-sarjana Ilmu Sosial.

- d. Revolusi Industri, yaitu ketika mulai menggunakan pendekatan ilmiah dalam setiap pemecahan masalah, termasuk dalam aspek Manajemen Ilmiah dan Analisis Sistem.

Fase Kedua, menurut Abuddin Nata (2005: 67), pada abad ke-19 yang ditandai dengan dimulainya ujicoba penerapan ilmu pengetahuan dalam aspek kehidupan, antara lain:

- a. Pertumbuhan penelitian empirik, yaitu dengan penerapan ilmu statistik, demografi, survei yang bersifat empiris tentang masalah kemiskinan, gelandangan, penyakit, dan kontrol politik.
- b. Tumbuhnya stabilitas politik yang diakibatkan oleh dominasi eksekutif terhadap legislatif dan ketidakseimbangan pelaku-pelaku sosial-ekonomi.
- c. Sumber-sumber praktis pengetahuan yang dispesialisasikan, yaitu **pada masa di mana pengetahuan ini dikemas dan dijadikan “Ilmu”**.

Fase Ketiga, menurut Abuddin Nata (2005: 56-57) pada abad ke-20 yang ditandai dengan semakin gencarnya gerakan implementasi ilmu pengetahuan seperti:

- a. Profesionalisasi ilmu sosial, yang mengkaji masalah-masalah kebijakan dan merumuskan alternatif solusinya.
- b. Gerakan ilmu-ilmu kebijakan, yang disumbang dari pemikiran Webber dan Mannheim, Ilmu Kebijakan Publik merupakan bidang kajian Ilmu Administrasi Negara, rumpun utama Ilmu Politik.
- c. Perspektif *analycentric*, yaitu pembatasan masalah ke dalam bagian-bagian yang dalam membandingkan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi melalui probabilitas numerik.
- d. Pelembagaan penelitian dan analisis kebijakan, yang berupa profesionalisasi keilmuan dari aspek substansi, proses, metodologi, dan konteks melalui lembagalembaga advokasi.
- e. Analisis kebijakan dalam masyarakat pascaindustri, yang bertujuan untuk menanggapi kelesuan ekonomi akibat perang, dan reaksi

terhadap pelaksanaan pemerintahan, dengan ciri-ciri pemusatan ilmu pengetahuan teoretis, kreasi teknologi intelektual, meluasnya kelas ilmu pengetahuan, perubahan dari barang ke pelayanan, instrumentalisasi ilmu, produksi dan penggunaan informasi.

- f. Bimbingan teknokratik, yaitu pengetahuan yang relevan dengan kebijakan semakin langka, sehingga memerlukan peningkatan kekuasaan dan pengaruh dari analisis kebijakan yang profesional; dan penyuluhan teknokratik yaitu peranan utama analisis kebijakan untuk mengesahkan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang riil.
- g. Assessment/penilaian, yaitu analisis kebijakan pada dasarnya tidak lepas dari proses politik yang merefleksikan dinamika dan konflik nilai di lingkungan masyarakat. Karena itu, analisis kebijakan lebih bersifat politis, sehingga pengembangan analisis kebijakan bukan hanya tugas intelektual atau keilmuan semata.

Dalam *Political Theory and Public Policy* karya Goodgin, menunjukkan bahwa kebijakan publik dari segi politik lebih banyak memberikan perhatian kepada substansi, dibandingkan dengan administrasi negara yang lebih memerhatikan masalah pilihan rencana, evaluasi pelaksanaan, efisiensi dan produktivitas, secara hal lain yang tidak berkenaan dengan isi dari kebijakan itu. Meskipun sebenarnya ilmu politik pun mengkaji kebijakan publik sebagai analisis yang bersifat deskriptif dengan membedakannya dengan substansi yang disebut *policy advocacy* yang bersifat preskriptif. Studi kebijakan sebenarnya menurut Goodgin hanyalah administrasi negara lama dalam baju yang diperbarui (Robert E. Goodgin: 1982, 10). Dan juga dalam *Policy Analysis* karya Dye, mengartikan kebijakan publik (*public policy*) sebagai *as projected program of goals, values and practice* (Thomas R Dye: 1981, 2).

Sedangkan menurut Leslie A. Pal kebijakan lebih kepada tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dipilih oleh otoritas publik

dalam upaya mengatasi masalah (public policy is what the government say to do or not to do) (Leslie A. Pal: 1996, 23). Dua aspek yang tidak lepas kaitannya dengan kebijakan ialah perspektif administrasi dan perspektif publik. Dalam perspektif administrasi, kebijakan diartikan sebagai tindakan politik untuk memengaruhi perilaku orang lain. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara bahwa kebijakan dapat pula bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu masalah (Solichin Abdul Wahab: 1990, 15). Sedangkan dalam perspektif kebijakan publik, Dunn dalam karyanya yang berjudul Public Policy Analysis An Introduction menganggapnya sebagai the process of producing knowledge of and in policy processes (William N. Dunn: 1994, 2).

Menyimak beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan negara tersebut. Negara dengan segala fungsinya berhak untuk membuat atau tidak membuat kebijakan. Kebijakan publik akan meliputi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagai balikan untuk kembali merumuskan kebijakan yang sesuai. Pendekatan yang umumnya dipengaruhi oleh pendekatan sistem, akan berupaya menjelaskan saling keterpaduan antara lingkungan sistem politik dan kebijakan publik. Dari berbagai pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertama, terminologi kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut

senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan (William N. Dunn: 1994, 26).

Menurut Soedijarto, dkk (2011: 78), berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang prinsipil, dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam konteks tata negara dikemukakan bahwa:

- a. Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Persoalan-Persoalan Implementasi Kebijakan

Dalam memahami suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkahlangkah

yang strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung atau menghambat, serta lingkungan, baik fisik, sosial maupun budaya. Hal yang perlu diwaspadai adalah dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan pendidikan (Soedijarto, dkk: 2011, 90).

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. Solichin Abdul Wahab (1990: 125) mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain:

- a. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan.
- b. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah.
- c. Sumber-sumber potensial yang mendukung.
- d. Keahlian pelaksanaan kebijakan.
- e. Dukungan dari khalayak sasaran.
- f. Efektifitas dan efisiensi birokrasi.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi kemampuan kebijakan tersebut yang secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya proses implementasi kebijakan perlu dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program-program yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Persoalan-Persoalan Implementasi Kebijakan di Era Globalisasi

Azril Azahari (2000: 79-80) mengemukakan bahwa persoalan-persoalan implementasi kebijakan di era globalisasi, penulis menemukan beberapa persoalan, antara lain:

a. Kualitas dan Kuantitas Perguruan Tinggi

Dilihat dari sektor demografi, Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Hal ini merupakan satu kekuatan yang patut diperhitungkan oleh negara-negara lain. Di samping itu, jumlah perguruan tinggi yang cukup besar di negara ini, dapat pula menjadi nilai atau posisi tawar (*bargaining position*) yang baik, terutama beberapa di antaranya dapat dikatakan memiliki peringkat yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan universitas atau perguruan tinggi di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dilihat dari kekuatan ini, seharusnya Indonesia mampu menjadi negara sasaran perburuan pendidikan tinggi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, mereka tidak perlu pergi jauh-jauh untuk belajar di negara-negara tersebut, cukup datang ke Indonesia saja.

b. Krisis Multidimensi

Krisis multidimensi yang melanda kawasan Asia Tenggara dan beberapa negara Asia Timur dalam beberapa tahun belakangan ini membuat kondisi perekonomian negara di kawasan tersebut belum mampu bangkit kembali terutama bangsa Indonesia. Sampai detik ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar antara bilangan 0 sampai 3 persen. Tingkat pertumbuhan yang kecil ini membuat Indonesia perlu mengkaji ulang beberapa proyek besar yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada dunia pendidikan. Usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia lewat dunia pendidikan menjadi terbengkalai dan terhambat.

c. Antara Memerangi Kebodohan dan Stabilisasi Ekonomi

Hal mendasar yang patut diperhitungkan oleh bangsa Indonesia, khususnya pemerintah saat ini ialah menjadikan negara besar dalam jumlah penduduk ini betul-betul besar dalam mutu sumber daya manusianya. Dengan demikian, tantangan terbesar bangsa ini ialah bagaimana mengalahkan kebodohan yang sementara ini sedang melanda sebagian rakyatnya. Meningkatkan mutu SDM lewat pendidikan menjadi sesuatu yang bersifat keniscayaan. Bangsa ini mau tidak mau harus melakukan perbaikan dan pembaruan di segala sektor yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

Sejalan dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah semua kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintahan daerah, kecuali pada bidang-bidang tertentu. Termasuk di antaranya bidang penigkatan mutu dan pemberdayaan SDM di setiap daerah masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Upaya untuk menarik investor asing atau dalam negeri untuk bersaing di dalam bidang pendidikan sebagian wewenang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik pusat atau daerah, yaitu bagaimana membagi wewenang ini agar tidak menjadi tumpang tindih atau bahkan menjadi sumber permasalahan atau konflik antara pemerintah pusat dan daerah (Abuddin Nata: 2005, 112).

Potret Pendidikan dan Kebijakannya di Masa Globalisasi

Dominasi era global telah membuat para penyelenggara pendidikan terjebak dalam perasaan ketidak-pastian dengan sistem pendidikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemajuan-kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, melampaui kesiapan lembaga-lembaga pendidikan dalam mendesain kurikulum, metode dan sarana yang dimiliki guna menghasilkan lulusan-lulusannya memasuki sebuah era yang ditandai dengan tingkat kompetisi dan perubahan yang begitu masif dan cepat. Saat ini, persoalan yang dihadapi

oleh lembaga pendidikan bukan lagi sekadar relevansi antara content yang diberikan kepada peserta didik dengan kebutuhan dunia kerja supaya lulusannya siap memasuki dunia kerja, tetapi dunia pendidikan juga dituntut untuk selalu mencermati relevansi dimensi paedagogies-didaktif (antara lain: tehnik pengajaran, kurikulum, metode, tempat pembelajaran dan lainnya) dengan trend budaya global. Yang perlu dicermati adalah globalisasi membawa akibat terjadinya perubahan yang terus menerus dan semakin cepat (Azyumardi Azra: 2002, 45).

Fenomena perubahan yang kian berakselerasi memberi imperatif berbagai lembaga pendidikan yang ada untuk terus melakukan self reform jika ingin tetap mempertahankan eksistensinya di jaman yang berlari seperti sekarang. Namun, juga perlu diperhatikan bahwa jika reformasi dilakukan secara serampangan, sekadar reaktif dan tidak visioner, justru akan menyebabkan terjadinya degradasi kemanusiaan di masa mendatang. Misalkan, sekitar tahun 80-an, dunia pendidikan kita dikritik habis-habisan oleh masyarakat, khususnya dari kalangan dunia kerja. Lulusan sekolah, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi, dikeluhkan tidak memiliki kapasitas dan ketrampilan yang memadai seperti dibutuhkan oleh dunia kerja. Mereka hanya pandai berteori, tetapi tidak menguasai teknispraktisnya. Tak ayal, kurikulum pendidikan, metode pengajaran, prasarana dan sarana praktek dan *link and match* dalam lembaga pendidikan menjadi pembicaraan publik. Dunia pendidikan bukannya tidak memahami atas persoalan tersebut. Negara, sebagai pihak yang mengemban amanat penyelenggara pendidikan terus melakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan penyempurnaan yang dibuat cenderung bersifat reaksioner. Kurang didasari visi yang jelas.

Doni Koesoema A. (2004) dalam artikelnya Pendidikan Manusia Versus Kebutuhan Pasar menilai bahwa tanggapan pemerintah atas berbagai persoalan dalam dunia pendidikan terkesan lebih bersifat

reaksioner ketimbang visioner. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan hanya didasarkan sikap reaktif, kaget, bingung, bahkan sekadar memenuhi kepentingan dan kebutuhan sesaat. Keluhan, bahwa ganti menteri ganti kebijakan, ganti buku pelajaran, dan lain adalah afirmasi atas situasi ini.

Selanjutnya, Doni Koesoema (2004: 45) memberi contoh kebijakan pemerintah yang kurang didasari visi jangka panjang di bidang pendidikan, pendidikan kita ditengarai menghasilkan orang-orang yang tidak siap masuk dunia kerja. Karena itu, satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah menyiapkan sekolah-sekolah agar menghasilkan orang-orang yang siap memasuki dunia kerja. Bagaimana caranya, diperkenalkan program link and match. Program link and match dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud, kini berubah menjadi Mendiknas) Wardiman Djojonegoro (1993-1998) yang mengaitkan berbagai macam program dan kurikulum di sekolah dengan tuntutan yang dibutuhkan perusahaan. Program link and match ini dalam implementasinya bernama Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dengan PSG dimaksudkan sebagai model belajar sambil magang kerja.

PSG merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara sistemik dan sinkron program pendidikan sekolah dan program penguasaan keahlian/ketrampilan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja dan diarahkan untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Dilihat sepintas, barangkali tidak ada yang keliru dengan PSG ini. Namun jika dicermati lebih jauh, maka akan terlihat bahwa visi yang ada di balik kebijakan PSG ini sangat membahayakan. Saat itu, link and match dianggap sebagai sebuah imperatif yang harus diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Ini merupakan dominasi dunia industri yang dibiarkan masuk dalam sistem pendidikan tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan diderita peserta didik dan bangsa

secara umum. Persoalan-persoalan yang dihadapi dunia pendidikan dengan link and match seolah-olah satu-satunya tujuan pendidikan yang dibenarkan adalah mempersiapkan peserta didik untuk cocok masuk sebagai salah satu bagian dari dunia industri. Maka, segala upaya pendidikan adalah harus disesuaikan memenuhi kebutuhan dunia kerja. Sekali lagi, program link and match tidaklah salah. Karena tujuan peserta didik menjalani pendidikan adalah untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Namun, menjadi bahaya manakala ini diasumsikan sebagai satu-satunya tujuan pendidikan. Dengan berasumsi demikian, maka fungsi-fungsi lain dari pendidikan direduksi, jika tidak dikatakan dihilangkan. Lembaga pendidikan yang mendesain kurikulumnya guna membekali peserta didiknya dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan dunia kerja merupakan sikap yang bijak. Karena, menciptakan sebuah kebijakan dalam dunia pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang mendesak dan terus ada. Namun, merupakan cerminan keterbatasan horizon pemikiran manakala beranggapan bahwa tujuan pendidikan semata-mata demi memenuhi kebutuhan praktis sesaat. Kebijakan pendidikan yang dilatari oleh horizon berpikir sempit seperti ini berpotensi melahirkan proses dehumanisasi pada diri peserta didik (N. Burbules; B. Torres eds: 2001, 98).

Pendidikan yang terlalu fokus pada upaya mencetak tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan dunia industri dan melupakan tujuan-tujuan pendidikan yang lain, akan melahirkan robot-robot berbaju manusia. Implikasi dari kebijakan-kebijakan pendidikan semacam itu telah lama kita rasakan. Misalkan, rendahnya moralitas, rendahnya sikap toleransi, rendahnya sikap menghargai sesama, lemahnya mental enterpreuner, rendahnya mental teamwork, minimnya jiwa kepemimpinan dan lainlain. Percepatan inovasi yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut manusia-manusia pembelajar yang terus mau dan mampu meng-

upgrade diri. Ini berarti lembaga pendidikan harus juga mampu mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar peserta didiknya. Lembaga pendidikan harus memberi keterampilan *learn how to learn*. Ketika lembaga-lembaga pendidikan 'dipaksa' mendesain kurikulumnya hanya untuk kepentingan *link and match*, dan mengabaikan *learn how to learn* ini, pasti akan menghasilkan generasi-generasi yang gagap terhadap aneka perubahan yang terjadi di era global ini (N. Burbules; B. Torres eds: 2001, 56).

Barangkali, generasi hasil program *link and match* akan menunjukkan kinerja yang memuaskan saat mereka baru memasuki dunia industri/kerja. Namun, ketika perusahaan harus menggunakan instrumen-instrumen baru, yang ini berarti menuntut para pekerjanya untuk mempelajari hal-hal baru, maka umumnya performadari generasi ini akan mengecewakan. Mereka kurang memiliki ketrampilan untuk mempelajari hal-hal baru. Belum lagi jika kita lihat fakta bahwa jenis-jenis pekerjaan yang sepuluh sampai dua puluh tahun lalu masih berjaya, kini satu per satu mulai sirna ditelan arus perubahan. Seperti diuraikan di atas, lembaga pendidikan yang terlalu terfokus pada program *link and match* bertujuan menghasilkan output yang memiliki ketrampilan pada jenis pekerjaan tertentu. Permasalahan muncul manakala jenis pekerjaan yang dikuasai tersebut dipaksa sirna, maka yang bersangkutan tidak mampu berbuat apa-apa.

Ketrampilan yang dimiliki dari lembaga pendidikan yang telah ditempuh menjadi tidak berguna bagi hidupnya. Artinya, program *link and match* yang dilakukan secara gegabah akan mempersempit ruang kerja alumninya. Kemajuan di bidang teknologi informasi memang banyak memberi kemudahan bagi kita saat ini. Melalui berbagai media elektronik (televisi dan internet), kita dan anak-anak kita setiap detik dibanjiri dengan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Banyak informasi yang memang berguna bagi kita dan anak-anak kita untuk meningkatkan pengatuan, ketrampilan dan sikap (Fasli Jalal; Dedi Supriadi: 2001, 112).

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan haruslah bersifat komprehensif baik terkait dengan waktu dan ditujukan untuk apa dan kepada siapa kebijakan tersebut dibuat. Hal ini agar kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan lebih baik tanpa harus ada beberapa bagian dari kebijakan tersebut yang sia-sia tidak terlaksana. Adanya suatu kebijakan pendidikan di era globalisasi saat ini menuntut bahwa suatu kebijakan pendidikan tersebut harus dikontekstualisasikan sesuai zaman atau tempat di mana ia berada bukan dibuat atas dasar sama rata atau adanya suatu dasar yang harus atau wajib dilaksanakan oleh semua pihak tanpa melihat konteks waktu ataupun tempatnya.

Jika demikian halnya yang terjadi maka dapat dipastikan kebijakan pendidikan tersebut akan mengalami banyak ketidaksesuaian dengan apa yang harus dicapainya mengingat latar belakang waktu atau tempat bahkan kondisi inilah yang mengharuskan kebijakan pendidikan lebih menyesuaikan terhadap berbagai hal tersebut. Bukan justru sebaliknya bahwa segala kondisi tersebut yang harus menyesuaikan kebijakan yang telah dibuat, tentunya hal ini sangat tidak mungkin suatu kebijakan pendidikan akan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jawi, M. Shiddiq. *Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Makalah dalam Seminar Nasional Potret Pendidikan Indonesia: Antara Konsep Realiti dan Solusi, diselenggarakan oleh Forum Ukhwah dan Studi Islam (FUSI) Universitas Negeri Malang, 7 Mei 2006.
- Azahari, Azril. 79 Dampak Globalisasi di Pendidikan Tinggi untuk Mengantisipasi Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 2000.

- Azra, Azyumardi. *Paradigma baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas. 2002.
- Burbules, N. ; B. Torres (eds.), *Globalization and Educational Policy*. New York: Routledge. 2001.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. London: Prentice Hall, Inc; Englewood Cliffs. 1994.
- Dye, Thomas R. *2 Policy Analysis*. Alabama: University of Alabama Press. 1981.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Goodgin, Robert E. *10 Political Theory and Public Policy*. Chicago: University of Chicago Press. 1982.
- Hamdi, Asep Saepul; E. Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Hasbullah, M. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Husaini, Adian, dkk. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Jalal, Fasli; Supriadi Dedi (eds.). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- Koesoema, A. Doni. *Pendidikan Manusia Versus Kebutuhan Pasar Dalam buku Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2004.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Pal, Leslie A. *23 Public Policy Analysis: An Introduction*. Ontario: Nelson Canada. 1996.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.

- Soedijarto, dkk. *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional: UU Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: t.p. 2011.
- Tilaar, H. A. R. *4-7 Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Wahab, Solichin Abdul. *15 Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.

